

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA REHABILITASI
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

**Nama: Mutia Resta Eliska
NPM: 1621020034**

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/ 2020M**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA REHABILITASI
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi di Dinas Sosial Bandar Lampung)

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

**Nama: Mutia Resti Eliska
NPM: 1621020034**

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)



**Pembimbing I : Dr.H. Khairuddin, M.H
Pembimbing II : Drs. H. Mundzir Hz., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di kota Bandar Lampung, dan juga merupakan salah satu permasalahan sosial. Maraknya orang dengan gangguan jiwa menggelandang yang banyak ditemukan di sekitar kota Bandar Lampung, perlu adanya upaya rehabilitasi oleh pemerintah, upaya rehabilitasi salah satu hal terpenting sebagai upaya yang di berikan kepada orang dengan gangguan jiwa, untuk memulihkan kejiwaan seseorang, upaya rehabilitasi sosial di laksanakan dipanti sosial milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta begitu pula dengan Dinas Sosial kota Bandar Lampung, memiliki kewajiban untuk memberikan upaya rehabilitasi kepada orang dengan gangguan jiwa.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa di lembaga Dinas Sosial kota Bandar Lampung perspektif hukum positif, serta bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap upaya rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial kota Bandar Lampung terhadap orang dengan gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penting yaitu pertama, bagaimana upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Bandar Lampung. Kedua, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research), metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (menggambarkan) yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang telah diperoleh menjadi rujukan untuk diambil sebagai rujukan selanjutnya di analisis secara sistematis dalam pembahasan. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yaitu, kesimpulan pertama, bahwa Dinas Sosial kota Bandar Lampung sudah melakukan upaya rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, meliputi beberapa upaya program pembinaan; pertama usaha pendataan meliputi pengendalian dan pengawasan. Kedua usaha penanggulangan terhadap orang dengan gangguan jiwa dilakukan dengan cara razia, perlindungan sewaktu-waktu, penampungan sementara, dan rujukan berdasarkan seleksi. Dan yang ketiga upaya rehabilitasi yang dilakukan di yayasan milik swasta. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial kota Bandar Lampung memiliki kendala dalam bidang fasilitas. Kesimpulan kedua, jika dianalisis secara Hukum Islam, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan tujuan Hukum Islam dalam teori masalah yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang mana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Bandar Lampung memberikan manfaat dalam mengurangi orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di kota Bandar Lampung.

Kata Kunci:Dinas Sosial, Rehabilitasi, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Hukum Islam, Hukum Positif.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Jurusan Siyasa Syar'iyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung menyatakan
bahwa :

Nama : **Mutia Resta Eliska**
TTL : Negeri Agung, 06 Mei 1998
NPM : 1621020034
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Orang
Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat hasil saya sendiri
tanpa mencontek atau hasil orisinal penulis tanpa adanya sebuah rekayasa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa
adanya sebuah rekayasa.

Bandar Lampung, Maret, 2020



Mutia Resta Eliska
NPM. 1621020034



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Mutia Resta Eliska

Npm : 1621020034

Jurusan : Syiasah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah

Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang
Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hi. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.

NIP. 195607271988031001

Mengetahui
Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, “Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” disusun oleh Mutia Resti Eliska, NPM. 162102003, program Studi: Siyasa (Hukum Tata Negara), Telah diujikan dalam sidang Munaqosa di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Sekretaris : Uswatun Hasanah, SPd., M.Pd (.....)

Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H (.....)

Penguji III : Drs. H. Mundzir Hz, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H (.....)

Pembimbing II : Drs. H. Mundzir Hz, M.Ag (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Khairuddin, M.H.

NPM. 196210221993031002

MOTTO

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هَمَّادٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَكْبُرَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada ustman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami yazid bin harun berkata telah mengabarkan kepada kami hammad bin salamah dari hammad dari ibrahim dari al-aswad dari aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda pena diangkat (dibebaskan) dari tiga golongan: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai mimpi basah (baligh) dan orang gila sampai ia kembali sadar (berakal).” (HR. Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih : 3822).



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kepada orang tuaku, Ayahanda Edi Sopyan dan Ibunda Hermanita, tercinta yang senantiasa tiada henti-hentinya memberikan do'a semangat, dukungan kepada penulis serta pengorbanan, kesabaran, ketulusan, kasih sayang dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi mewujudkan cita-citaku, Semoga Allah SWT memuliakan kalian di dunia dan akhirat. Amiin.
2. Kakak kandungku tercinta Regi Herizal, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan tak lupa keluarga besar tercinta yang selalu menginspirasi penulis untuk semangat terus dalam menggapai cita-cita.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Mutia Resti Eliska, Dilahirkan pada tanggal 06 mei 1998 di Desa Negeri Agung Way Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit, Liwa Lampung Barat. Penulis adalah putri dari 2 bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak edi sopyan dan ibu hermanita. Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar di (SD) Negeri 2 Way Empulau Ulu, Liwa Lampung Barat tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010
2. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Negeri 1 Liwa Lampung Barat dan lulus tahun 2013
3. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di (SMA) Negeri 1 Liwa, dan lulus pada tahun 2016
4. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui jalur undangan atau SPAN PTKIN di Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Aktivitas kemahasiswaan penulis dimulai saat dibangku perkuliahan baik organisasi internal ataupun organisasi eksternal. penulis selama menjadi mahasiswa Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Penulis aktif di Organisasi Interna Kampus yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Moot Court Community (UKM-F MCC) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Organisasi Eksternal Kampus yaitu Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Dewan Nasional Lampung (LMND DN).

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat taufik, hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawa beriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa hambanya dari zaman kegelepan ke zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi yang berjudul “ Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Orang Denga Gangguan Jiwa (ODGJ) Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini, penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi berbagai macam hambatan dan rintangan yang ada, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak maka penulis tidak bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih secara tulus kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. Hi. Muhammad Mukri, M.Ag. yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Raden Intan Lampung lebih baik lagi dan membawa banyak perubahan.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Dr. Hi. Khairuddin, M.H.

3. Kepala Jurusan Siyash Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bapak Frenki, M.Si.
4. Bapak Dr. Hi. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing 1 yang selalu mendukung dan mensupport untuk segera menyelesaikan studi dengan waktu tepat.
5. Bapak Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag. Selaku pembimbing 2 yang selalu memberi dukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Bapak Ibu dosen beserta staff akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bapak Drs. Muzarin Daut, MM. Kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas sosial kota bandar lampung yang sudah memberikan pelayanan berupa pemberian data kepada penulis untuk memudahkan mengerjakan skripsi ini.
8. Bapak Suheri, S.Sos.MM. Seksi pelayanan bidang rehabilitasi tuna sosial Dinas sosial kota bandar lampung yang sudah memberikan motivasi dan arahan serta pelayanan berupa pemberian data kepada penulis untuk memudahkan mengerjakan skripsi ini.
9. Ibu Eka, selaku perawat di yayasan aulia rahma yang sudah memberikan informasi dan sudah membantu penulis mendapatkan data-data sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Teman dan Sahabatku M.wawan Afriadi yang sudah memberi motivasi serta menemani proses penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada semua teman-teman Siyasah 2016 kelas B, Dapri , Tiyas, Nindy,wahyu, Okta, Eggy, Saras, Sucinadia, Sudirman, Andi, Dani dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang sudah mau menemani dan mendengarkan keluh kesah saat pengerjaan skripsi ini dan yang selalu memberikan semangat.

12. Untuk para keluarga besar dari ibuk dan Bapak Alhamdulillah Skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu dan doakan cepet dapet kerjaan ya.

13. Untuk para organisasi yang pernah dan sedang diikuti penulis, terima kasih sudah mengajarkan hal-hal baru dan telah mengajarkan arti dari sebuah pertemanan, kekeluargaan dan kebersamaan serta telah membantu penulis dalam berproses.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Juli 2020
Penulis

Mutia Resta Eliska
NPM.1621020034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian	11
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	18
1. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) perspektif Hukum Positif	
a. Pengertian Dinas Sosial.....	18
b. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial	18
c. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa	20
d. Hak-Hak Orang dengan Gangguan Jiwa	21
e. Upaya Kesehatan Jiwa Menurut Peraturan Perundang-Undangan	22
f. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010	29
g. Orang Dengan Gangguan Jiwa Merupakan Tanggung Jawab Negara	33
2. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Perspektif Hukum Islam	
a. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Perspektif Hukum Islam.....	35
b. Konsep Penemuan Hukum Islam Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	41
c. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Perspektif Hukum Islam	45
d. Tahap-Tahap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam.....	48
B. Tinjauan Pustaka	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran umum objek Penelitian
 - 1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 55
 - 2. Visi Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 57
 - 3. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 57
- B. Deskripsi Data Penelitian
 - 1. Gambaran Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung 59
 - 2. Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Merehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 60
 - 3. Tahap-tahap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 62

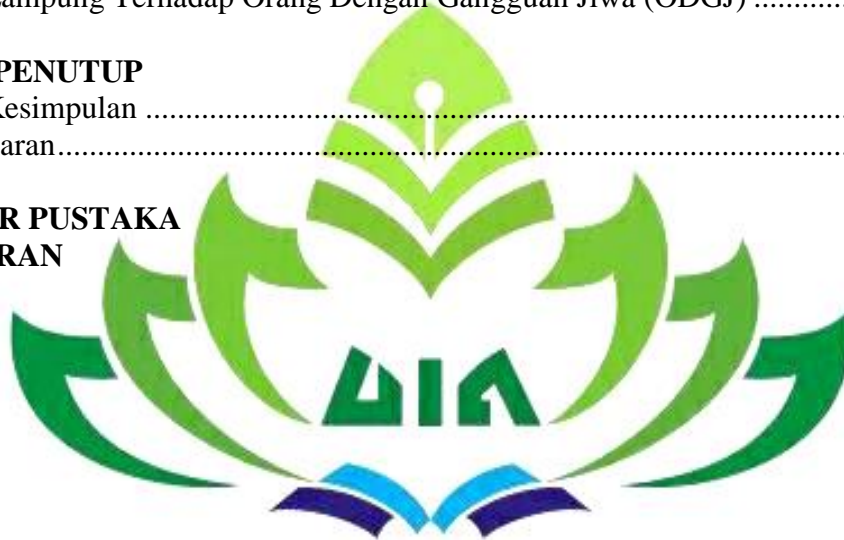
BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Proses Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pespektif Hukum Positif 64
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan nama yang di pakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu¹. Judul karya ilmiah ini adalah “Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”.

Untuk memberi gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan serta kekeliruan maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul proposal ini, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat². Menurut peneliti peran adalah posisi dan fungsi seseorang yang memiliki kedudukan.
2. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana tugas Wali Kota, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kota di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu³. Dinas Sosial menurut penulis adalah lembaga organisasi yang membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan di bidang sosial.

¹Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.590

² *Ibid*, h.667

³ Peraturan WaliKota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.

3. Upaya Rehabilitasi ODGJ diartikan sebagai usaha memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan disfungsi sosialnya secara wajar, usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar⁴. Menurut penulis upaya rehabilitasi ODGJ merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memulihkan kejiwaan ODGJ.

4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan⁵.

5. Hukum Islam dalam arti *syari'ah* ajaran Islam yang menetapkan sepenuhnya menjadi otoritas dan hak prerogative Allah, dan manusia tidak dapat melakukan intervensi untuk menetapkannya dan merubahnya.⁶

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul “Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” Adalah untuk mengkaji secara mendalam peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya merehabilitasi ODGJ yang kemudian akan ditelaah melalui Hukum Islam.

⁴*Ibid.*, h.1250

⁵ *Ibid.* h.864

⁶Drs.Maimun, S.H.,Ma.*Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya*. Anugrah Utama Raharja (Aura), (B.Lampung ,2013) h.3

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah :

1. Alasan Objektif :

- a. Masalah ODGJ yang terlanter di Kota Bandar Lampung menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat dan sangat memprihatinkan sehingga penulis menganggap perlu melakukan sebuah penelitian mengenai masalah ODGJ.
- b. Munculnya banyak manusia yang terkena gangguan jiwa yang penulis temui di jalan-jalan sekitar Bandar Lampung yang menjadi bahan perbincangan dan juga bisa meresahkan masyarakat sehingga penulis menganggap perlu melakukan sebuah penelitian mengenai masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlanter.
- c. Secara akademis masalah ini ada hubungannya dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. yang dianggap penulis perlu dilakukan penelitian tentang ODGJ.

2. Alasan Subjektif

Secara akademis masalah ini ada hubungannya dengan disiplin ilmu Siyasah yang didapat penulis selama menjalani kuliah di jurusan siyasah syar'iyah. Disamping itu juga judul masalah ini perlu untuk di adakan pembahasan dalam skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia terkhusus di Kota Bandar Lampung. Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan yang tidak normal baik secara fisik maupun mental.

Gila menurut syariat Islam adalah hilangnya kemampuan berpikir. Abdul Qadir sudah memberikan definisi gila sebagai berikut:

الْجُنُونُ بِأَنَّهُ زَوَالُ الْعَقْلِ أَوْ اخْتِلَالُهُ أَوْ ضَعْفُهُ .

Artinya :Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.⁷

Menurut zakiah daradjat dalam buku keperawatan jiwa orang yang terkena *neurosa* masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, serta kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya, sedangkan orang yang terkena psikosa tidak memahami kesukaran kesukarannya, kepribadiannya tidak ada integritas dan ia hidup dari alam kenyataan.keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting di antaranya adalah: ketegangan, rasa putus asa, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa, dan tidak mampu mencapai tujuan⁸.

Gangguan jiwa dalam berbagai bentuk adalah penyakit yang sering dijumpai pada semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk gangguan

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2006) H. 127

⁸Iyus Yoseph, *Keperawatan Jiwa*, (Bandung: Refika Aditama,2010), h.77

kejiwaan yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi adalah skizofrenia dan penyakit ini bisa dialami oleh siapa saja. Seseorang yang mengalami gejala skizofrenia sebaiknya segera dibawa ke psikiater dan psikolog, dengan kata lain penderita penyakit skizofrenia yang ada di jalanan sebaiknya dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Hal ini diperlukan karena untuk menyembuhkan penyakit skizofrenia, penderita perlu dirawat melalui pengobatan yang efektif serta kepatuhan pasien menjalani perawatan. Selain itu perlu diberikan pendidikan kesehatan jiwa yang ditujukan kepada pasien, keluarga yang merawatnya, atau orang lain yang bertanggungjawab merawatnya, Tapi tidak kalah penting adalah dukungan keluarga terhadap penderita dalam upaya penyembuhan penyakit ini baik secara moril maupun materil⁹. Skizofrenia menurut penulis sama halnya dengan ODGJ yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, skizofrenia dan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam fikiran prilaku dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia, ungkapan ODGJ menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa sedangkan skizofrenia merupakan istilah dalam bahasa kedokteran.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 18 tahun 2014 dalam pasal (1) Kesehatan Jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat

⁹Jhohannes Happosan Situmorang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Penderita Skizofrenia Yang Mengalami Penelantaran*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011) h.

bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya¹⁰. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Gangguan jiwa dapat menyerang siapa saja dan tidak mengenal usia. Gangguan jiwa tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga bisa menyerang anak-anak muda dan remaja, umumnya, penderita gangguan jiwa orang tua, namun tak jarang juga ditemukan beberapa penderita kejiwaan adalah anak muda dan remaja. ada beberapa pandangan dari masyarakat yang mengatakan gangguan jiwa berasal dari guna-guna orang lain ada juga yang mengatakan memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan¹¹.

Penyakit jiwa dalam pandangan Hukum Islam identik dengan tingkah laku yang tercela atau *al-ahlaq al-mazmumah* seperti sifat tamak, dengki, arogan, sombong, iri hati dan emosian, sifat tercela di atas merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia¹².

¹⁰ Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Pasal 1)

¹¹ *ibid*

¹² A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), h.77

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang selalu menjamin seluruh warga negaranya memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali. Salahsatu yang memiliki tenaga pekerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yakni Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu¹³.

Undang-Undanng Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa yang disebut pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial¹⁴.

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, berbicara tentang keadilan yang tertuang pada dasar negara Pancasila, pada sila kelima yang berbunyi “*Kedilan sosial bagi seluruh rakyat*

¹³ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Pasal 4

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1

Indonesia”, dalam dokumen lahirnya Pancasila, Bung Karno mengusulkan adanya prinsip kesejahteraan sebagai salah satu dasar negara.¹⁵ Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang mendukung masyarakat sehingga saling menunjang dan melengkapi dalam terwujudnya tujuan nasional, salah satu permasalahan kesejahteraan sosial adalah penderita gangguan jiwa, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan berbagai kalangan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar sebagai hak setiap warga negara. Dalam hal ini meliputi rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial¹⁶.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 11, dalam memberikan Upaya Rehabilitasi ODGJ meliputi: usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik dimaksud untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa (dalam upaya penyembuhan) dan dikembalikan kepada keluarga atau kedaerah asal (dinyatakan telah sehat dari

¹⁵Mawardi, Nurhidayati. *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.172

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

rumah sakit bersangkutan) yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/ atau *steakeholder*.¹⁷ Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Pasal 28 menyatakan bahwa upaya rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/ atau rujukan.¹⁸

Masalahnya sekarang adalah bagaimana peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa? apakah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah menjalankan upaya rehabilitasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar? Berdasarkan latar belakang di atas dipandang perlu untuk diteliti dan dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa(ODGJ) Perspektif Hukum Islam (Study di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap upaya

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Pasal 11

¹⁸ Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa , Pasal 28

rehabilitasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Positif ?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap upaya rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam memberikan Rehabilitasi Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
2. Untuk menguraikan bagaimana Pandangan Hukum Islama terhadap Upaya rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

G. Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Dinas Sosial khususnya dalam Upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
 - b. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan khasanah pengetahuan khususnya mengenai Upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
2. Manfaat secara praktik :
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran keilmuan di bidang hukum, khususnya peran Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi dan sebagai referensi untuk di jadikan penelitian lanjutan.
 - b. Bermanfaat bagi penulis Sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode penelitian

Menurut susiadi Dalam buku metodologi penelitian, definisi metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu di laksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknis penelitian hal ini di sebabkan ke tiga hal tersebut saling berhubungan

dan sangat sulit dibedakan. metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian¹⁹.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung di lakukan di lapangan atau pada responden²⁰. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan langsung pada responden.

b. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif adalah metode mengumpulkan informasi aktual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistem fakta atau karakteristik populasi tertentu.²¹. Data yang di kumpulkan berupa kata kata, gambarandan bukan angka-angka dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data yang di dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, vidiotape, dan dokumentasi²². Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan

¹⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2016), h. 26

²⁰ *Ibid*, h. 12

²¹ *Ibid*, h. 29

²² *Ibid*, h.7

menguraikan data-data yang telah di peroleh dari hasil penelitian di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan hasil observasi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu di peroleh²³. Tempat data adalah bahan informasi untuk proses berikir gamblang, pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.²⁴ Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangann dan dikumpulkan. data primer dalam penelitian ini akan di peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi dengan para pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan hasil observasi.

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetaka atau elektronik, peraturan daerah, kamus hukum, ensiklopedia, dan buku buku pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian.

²³ Abdurkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115

²⁴ *Ibid*, h. 111

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas serta lengkap dari objek yang akan di teliti.²⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, adapun populasi dalam penelitian ini pertama kepala bidang dan rehabilitasi sosial bapak Muzarin Daut, kedua seksi fasilitasi dan rehabilitasi korban narkoba bapak Supriadi, ketiga seksi pelayanan anak dan rehabilitasi penyandang cacat ibu Evazati, keempat seksi pelayanan rehabilitasi tuna sosial bapak Suheri.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁶

Objek pada penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, subjek yang dijadikan sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini yaitu pertama, Drs. Muzarin Daut, MM selaku kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Kedua, yaitu Dra. Hj. Faridah selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Ketiga, yaitu Suheri, S.Sos. MM selaku seksi pelayanan rehabilitasi tuna

²⁵ Sugiono , *metode penelitian pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, cetakan ke XV, 2012), h.194

²⁶ *Ibid*, h.195

sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Keempat peneliti juga melakukan observasi di yayasan Aulia Rahmah sebagai data tambahan untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian yaitu ibu Eva selaku perawat yang bertugas di yayasan Aulia Rahmah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data meliputi²⁷:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁸

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen

²⁷*Ibid*, h.134

²⁸*Ibid*, h. 168

²⁹*Ibid*, h.158

yang di gunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.³⁰

5. Pengelolaan Data

Tehnik pengelolaan data setelah data terkumpul dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti, dengan tujuan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan.
- b. *Coding* yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh dengan kode tanda tertentu, dengan tujuan menyajikan data secara sempurna.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.³¹

6. Metode analisis data

Setelah data diperoleh, selanjutnya menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut, data berasal dari naskah wawancara lapangan, catatan, video dokumentasi dan dokumentasi resmi.³²

³⁰*Ibid*, h.170

³¹ Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah* (Lampung: Fakultas Hukum dan Cara Pendekatan Masalah (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), h.12

³²*Ibid*, h.7

Penulis juga menggunakan analisis data secara induktif. Metode Induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, lalu penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.³³

7. Pemeriksaan keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh penulis yaitu triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³⁴ Sugiono membedakan triangulasi menjadi dua macam :

- a. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
- b. Triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan tehnik yang sama.³⁵

Triangulasi yang digunakan penulis yakni triangulasi tehnik yakni dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

³³ Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulak*, Iain Ril, Bandar Lampung, 2015 h.10

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.327.

³⁵ *Ibid*, h.84

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Perspektif Hukum Positif

a. Pengertian Dinas Sosial

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada gubernur melalui sekretaris daerah³⁶. Dinas sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Sedangkan pekerja sosial masyarakat yang di singkat PSM adalah warga perseorangan/ kelompok yang mempunyai minat, kemampuan dan kemauan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.³⁷

Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat perorangan/kelompok yang mempunyai minat, kemampuan dan kemauan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial³⁸

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

³⁶ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Derah Provinsi Lampung.

³⁷ Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

³⁸ Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Pasal 3: Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹ dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala dinas juga dibantu oleh perangkat organisasi dinas sosial yang terdiri dari sekretaris, bidang pemberdayaan sosial, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, bidang bantuan dan jaminan sosial, bidang kesejahteraan sosial, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional⁴⁰.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas dinas sosial mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas lingkupnya;
- 4) Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelapor sesuai dengan lingkup tugasnya;

³⁹Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Pasal 3

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 6

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh waliKota;⁴¹

Berdasarkan tugas fungsi dinas sosial Kota Bandar Lampung yang di paparkan di atas maka dinas sosial melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan.

c. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) / Gangguan psikotik.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menjelaskan Pasal (1): Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan, yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak sebagai manusia.⁴² Dari pengertian ODGJ dan ODMK berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa dalam penelitian ini

⁴¹Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

⁴²Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

penulis memfokuskan pada penelitian Rehabilitasi ODGJ yang memiliki tingkat gangguan kejiwaan yang menimbulkan penderita memiliki hambatan dalam menjalankan fungsi otak.

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorin dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efek mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁴³ Dari penjelasan di atas penyandang disabilitas salah satunya adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau psikotik yaitu seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya.

d. Hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Menurut UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal (70) : ODGJ berhak

- 1) Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa difasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
- 2) Mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa;
- 3) Mendapat jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
- 4) Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;

⁴³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010

- 5) Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi dibidang kesehatan jiwa;
- 6) Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
- 7) Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
- 8) Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya; (hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan).⁴⁴

e. Upaya Kesehatan Jiwa Menurut Perundang-Undangan

Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan /atau masyarakat.

Upaya kesehatan jiwa berdasarkan

- 1) Keadilan;
- 2) Prikemanusiaan;
- 3) Manfaat;
- 4) Transfaransi;

⁴⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

- 5) Akuntabilitas;
- 6) Komprehensif;
- 7) Pelindungan;
- 8) Non diskriminasi.⁴⁵

Upaya kesehatan jiwa bertujuan

- 1) Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
- 2) Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;
- 3) Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan Hak Asasi Manusia;
- 4) Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan, melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ;
- 5) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa;
- 6) Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
- 7) Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 2

Dalam hal ini peneliti ingin memaparkan upaya kesehatan jiwa melalui upaya rehabilitasi, pasal (25) upaya rehabilitasi kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditunjukkan untuk:

- 1) Mencegah atau mengendalikan disabilitas;
- 2) Memulihkan fungsi sosial;
- 3) Memulihkan fungsi okupasional; dan
- 4) Mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.⁴⁶

Pasal (26-30) upaya rehabilitatif ODGJ meliputi Rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial dan rehabilitasi sosial, upaya rehabilitatif psikiatrik dan/atau psikososial dilaksanakan sejak dimulainya pemberian pelayanan kesehatan jiwa terhadap ODGJ. upaya rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivasi, atau koersi, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. dan upaya rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:

- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial;
- 2) Perawatan dan pengasuhan;
- 3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- 4) Bimbingan mental spiritual;
- 5) Bimbingan fisik;
- 6) Bimbingan sosial dan asistensi sosial;

⁴⁶ *Ibid*, pasal 25

- 7) Pelayanan aksesibilitas;
- 8) Bantuan sosial dan asistensi sosial;
- 9) Bimbingan resosialisasi;
- 10) Bimbingan lanjut; dan /atau
- 11) Rujukan.⁴⁷

Bimbingan sosial seperti yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf 2) dilaksanakan di panti sosial milik pemerintahan, pemerintah daerah, atau swasta. Dalam hal ini upaya rehabilitasi sosial merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.⁴⁸ Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian tentang upaya rehabilitasi ODGJ di lembaga dinas sosial Kota Bandar Lampung, karena sebatas pengetahuan peneliti bahwa dinas sosial yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial . Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa pada pasal (6) sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dan diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi:

- 1) Kemiskinan;
- 2) Ketelantaran;
- 3) Kecacatan;

⁴⁷ *Ibid*, pasal 26

⁴⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

- 4) Keterpencilan;
- 5) Ketunaan sosial,dan penyimpangan prilaku;
- 6) Korban bencana; dan/atau
- 7) Korban tindak kekerasan,eksploitasi dan diskriminasi.⁴⁹

Menurut Dora Peyer, masalah kesejateraan bersumber pada keadaan tidak berdaya, adapun keadaan tidak berdaya meliputi keadaan tidak berdaya alamiah karena sakit, cacat dan wanita yang mengandung dan melahirkan anak⁵⁰. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah sosial pada keterlantaran dan kecacatan di mana seorang ODGJ termasuk dalam masalah sosial karena ODGJ merupakan cacat dalam hal mental atau gangguan dalam kejiwaan sehingga dapat menimbulkan gangguan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak sehingga peneliti menganggap harus dilakukan upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Bandar Lampung dengan cara memberikan upaya rehabilitasi sosial.

Pasal (8) rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, rehabilitasi sosial ditunjukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

⁴⁹ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

⁵⁰Rohiman Nootowidagdo *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,(Jakarta: AMZAH,2016) h.115

- 1) Penyandang cacat fisik;
- 2) Penyandang cacat mental;
- 3) Penyandang cacat fisik dan mental;
- 4) Tuna susila;
- 5) Gelandangan;
- 6) Pengemis;
- 7) Eks penderita penyakit kista;
- 8) Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP);
- 9) Korban penyalahgunaan Napza;
- 10) Eks psikotik;
- 11) Pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- 12) Orang yang *human immunodeficiency virus* (HIV) / *Acquired immuno deficiency syndrome* (AIDS) / ODHA;
- 13) Korban tindak kekerasan;
- 14) Korban bencana alam dan bencana sosial;
- 15) Korban perdagangan orang;
- 16) Anak terlantar dan anak jalanan;
- 17) Anak dengan perlindungan khusus;
- 18) Penyandang disabilitas rungu wicara;
- 19) Anak-anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- 20) Anak dengan disabilitas.⁵¹

⁵¹*Ibid.*

Pemaparan di atas menurut peneliti bahwa ODGJ atau penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental atau gelandang maupun ODGJ yang menggelandang itu perlu dilakukan upaya rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun pemerintah daerah sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak sebagai warga negara Indonesia.

Rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud pada pasal (8) diberikan dalam bentuk:

- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang kesehatan;
- 2) Perawatan dan pengasuhan menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang kesehatan;
- 3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang pendidikan;
- 4) Bimbingan mental sepiritual menjadi tanggung jawab bidang sosial bidang keagamaan dan bidang pendidikan;
- 5) Bimbingan fisik menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang keolahragaan;
- 6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial menjadi tanggung jawab sosial dan kesehatan;
- 7) Pelayanan aksesibilitas menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang perhubungan, bidang pekerja umum dan bangunan;

- 8) Bantuan dan asistensi sosial menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang tenaga kerja, bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan;
- 9) Bimbingan resosialisasi tanggung jawab bidang sosial;
- 10) Bimbingan lanjut menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, badan usaha milik daerah; dan/atau
- 11) Rujukan.⁵²

f. Upaya Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Sedangkan gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak hak dasar bagi kemanusiaan. Usaha rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pementapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah

⁵²*Ibid.*

kesejahteraan mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara⁵³

Upaya dinas sosial dalam merehabilitasi gelandangan psikotik dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, Gelandangan dan pengemis yaitu: Pasal 2, bahwa Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan berdasarkan :

- 1) Asas pengayoman;
- 2) Asas kemanusiaan;
- 3) Asas kekeluargaan;
- 4) Asas keadilan;
- 5) Asas ketertiban umum dan kepastian hukum;
- 6) Asas keseimbangan, kepastian, dan keselarasan⁵⁴.

Pembinaan terhadap anak jalanan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan tujuan. Pasal 3 tujuan pembinaan gelandangan yaitu:

- 1) Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat;
- 2) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- 3) Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;

⁵³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, h. 5

⁵⁴ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Pasal 2

- 4) Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- 5) Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- 6) Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara⁵⁵.

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis pasal 4 meliputi:

- 1) Anak yang berada di tempat umum yang perilakunya dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktivitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan panti asuhan;
- 2) Gelandangan dan pengemis;
- 3) Pengguna jalan yang memberi uang dan/ atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa kasihan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- 4) Orang tua dan/ atau keluarga anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- 5) Pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan memperkerjakan anak dibawah umum

⁵⁵ *Ibid, pasal 3*

6) Tujuan untuk turun kejalan sebagai pengemis⁵⁶.

Pasal (5) program pembinaan, Dalam mewujudkan pembinaan maka diselenggarakan program yang terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan, dan rehabilitasi sosial. Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Adapun usaha pencegahan dilakukan dengan cara pendataan; pemantauan, pengendalian dan pengawasan; sosialisasi; penyuluhan. Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dilakukan oleh dinas sosial dan/atau berkerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat (perorangan, keluarga), organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.⁵⁷

Pasal (7) Dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemantauan dan pengendalian dan pengawasan kerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat dengan cara

- 1) Melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan dinas sosial Kota Bandar Lampung;
- 2) Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas di tempat umum secara perseorangan, keluarga maupun secara kelompok⁵⁸.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 4

⁵⁷ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis, h. 8

⁵⁸ *Ibid*, pasal 7

Pasal 8 usaha penanggulangan, usaha penanggulangan merupakan usaha meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umu dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seorang maupun kelompok. Adapun usaha penanggulangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Razia;
- 2) Perlindungan ;
- 3) Pengendalian sewaktu-waktu;
- 4) Penampungan sementara;
- 5) Pendekatan awal;
- 6) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*);
- 7) Pendampingan sosial;
- 8) Rujukan berdasarkan seleksi⁵⁹.

Pasal (10) usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan dan gelandangan, pengemis yang dilakukan melalui sistem panti dan/ atau luar panti. Dan yang menjadi sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah :

- 1) Anak jalanan usia produktif;
- 2) Anak jalanan usia balita;
- 3) Anak jalanan usia sekolah;
- 4) Gelandangan psikotik;

⁵⁹ *Ibid*, pasal 8 ayat (1)

- 5) Gelandangan usia lanjut;
- 6) Pengemis usia produktif;
- 7) Pengemis usia lanjut;
- 8) Pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan.⁶⁰

Usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik dimaksud untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk kerumah sakit jiwa (dalam upaya penyembuhan) dan dikembalikan kepada keluarga atau kedaerah asal (dinyatakan telah sehat dari rumahsakit bersangkutan) yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/ atau *stakeholder*.⁶¹

g. Orang Dengan Gangguan Jiwa Merupakan Tanggung Jawab Negara

Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun ODGJ. Meningkatnya prevalensi gangguan jiwa memaksa peneliti untuk menyelami kembali fokus perlindungan masyarakat terhadap risiko gangguan jiwa. Mencegah lebih baik daripada mengobati, oleh karena itu perlindungan terhadap mereka yang berisiko penting untuk memutuskan mata rantai penyakit ini. Usaha untuk melindungi kesehatan jiwa sudah sampai pada taraf internasional, di mana WHO mendorong setiap negara

⁶⁰ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis, h.10

⁶¹ *Ibid*, h.12

untuk melindungi masyarakatnya dengan perangkat hukum yang komprehensif⁶²

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, dan alami sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa. oleh karena itu, wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan kebebasan dan keadilan yang terkandung dalam HAM Dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter yang menjadi ciri *civil society*. Oleh karena itu, penegakan HAM merupakan syarat dalam menciptakan masyarakat yang Madani.⁶³ Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun ODGJ.

Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas Kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. falsafah dasar dari jaminan Hak Kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* Kemartabatan manusia. problem kesehatan tidak lah berdiri sendiri. Ranah kesehatan berkaitan erat dengan faktor-faktor lain kehidupan manusia.⁶⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum, Bab x pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di

⁶²Elga Andina, Pelindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa, *Aspirasi* Vol. 4no. 2, Desember 2013, H.144

⁶³Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta:2009), h.5

⁶⁴*Ibid*, h.152

dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi HAM Sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam konstitusi Indonesia sudah dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Sebagai negara hukum maka erat kaitannya dengan hak asasi manusia dalam hal ini ODGJ Sebagai masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali, Negara wajib memfasilitasi dan memberi penghidupan yang layak bagi penyandang gangguan jiwa.

2. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Islam

a. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Perspektif Hukum Islam

Menurut padnangan Islam, badan yang sehat akan menghasilkan sikap optimis dan penuh harapan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Atas dasar alasan tersebut, maka Islam menganjurkan agar masyarakat melakukan segala langkah yang diperlukan, untuk menjamin kelangsungan hidup orang-orang Islam.⁶⁵ Kesehatan adalah anugrah paling penting, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Orang yang tidak sehat tidak akan dapat melaksanakan kewajiban dan mengamalkan perintah Allah dengan

⁶⁵Rohiman Nootowidagdo *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,(Jakarta: AMZAH,2016) h.133.

baik. Tidak ada anugrah Allah lainnya yang nilainya sebanding dengan anugrah kesehatan. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi saw yang berbunyi:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْنَى الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّكَ لَكَ
جِسْمَكَ وَتُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

Artinya: “Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah pertanyaan: “Bukankan Kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan?”⁶⁶.

Kesehatan mental, Nabi Saw, juga mengisyaratkan bahwa ada keluhan fisik yang terjadi akibat gangguan mental. Suatu ketika, seseorang datang mengeluarkan penyakit perut yang diderita saudaranya, setelah diberikan obat berkali-kali, ia tidak kunjung sembuh. Al-Qur'an Alkarim memang banyak berbicara tentang penyakit jiwa mereka yang lemah iman, dinilai oleh Al-Qur'an sebagai orang yang memiliki penyakit didalam dadanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an, yaitu:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠٠﴾

⁶⁶ Lihat HR. Tirmidzi No.3358, *Tirmidzi* no.3358. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa Hadits ini Shahih.

*Artinya: Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta (QS. Al Baqarah: 10)*⁶⁷

Al-Qur'an tidak kurang sebelas kali disebut istilah "*fiqulubih maradh*" kata *qalb* atau *qulub* dipahami dalam dua makna, yaitu akal dan hati. Adapun kata *maradh* biasa diartikan sebagai penyakit⁶⁸. Secara rinci, pakar bahasa, Ibnu Faris mendefinisikan kata tersebut sebagai "segala sesuatu yang mengakibatkan manusia melampaui batas keseimbangan/kewajaran dan mengantar kepada terganggunya fisik, mental bahkan kepada tidak sempurnaan amal seseorang"⁶⁹. Dari sini Al-Qur'an memperkenalkan penyakit-penyakit yang menimpa hati dan menimpa akal. Penyakit-penyakit akal yang disebabkan bentuk kelebihan adalah semacam kelicikan, sedangkan yang bentuknya karena kekurangan adalah ketidaktahuan akibat kurangnya pendidikan. Seseorang yang tidak tahu serta tidak menyadari ketidaktahuan pada hakikatnya menderita penyakit akal berganda. Penyakit akal berupa ketidaktahuan, mengantarkan penderitaannya pada keraguan dan kebimbangan. Penyakit-penyakit kejiwaanpun beraneka ragam dan bertingkat-tingkat, sikap angkuh, benci, dendam, fanatisme, tamak dan kikir, antara lain disebabkan oleh bentuk berlebihnya seseorang. Adapun rasa takut, cemas, pesimisme, dan rendah diri, adalah karena kekurangannya. Sementara itu orang yang akan

⁶⁷ Lihat Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqarah: 10

⁶⁸ Rohiman Nootowidagdo *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 30

⁶⁹ *Ibid*, h. 30

memperoleh keberuntungan di hari kemudian, adalah mereka yang terbebas dari penyakit-penyakit tersebut. Islam mendorong manusia agar memiliki kalbu yang sehat dari segala macam penyakit dengan jalan berobat , dan mendekatkan diri pada Tuhan.⁷⁰ Hal ini sejalan dengan firman Allah⁷¹:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.(QS. Ar-Rad [13] :28)

Orang yang terkena gangguan jiwa akan mengalami penyakit hati yang merupakan penyakit psikis, penyakit ini tidak hanya akan menggerogoti seseorang tetapi jauh pada perusakan jiwa. Para ahli mengatakan bahwa kondisi psikis akan mempengaruhi saraf dan saraf akan mempengaruhi kelenjar, kelenjar akan mengeluarkan cairan (hormon) dalam tubuh cairan ini akan mempengaruhi kekebalan tubuh.⁷²

Gila menurut Syariat Islam adalah hilangnya kemampuan berfikir seseorang karna faktor bawaan sejak lahir atau karna adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Abdul Qadir Audah memberikan definisi gila sebagai berikut.

⁷⁰ Rohiman Nootowidagdo *Pengantar Kesejahteraan Sosial, Ibid*, h. 31

⁷¹ Lihat kitab suci Al-Qur'an Surat Ar-Rad [13] Ayat 28

⁷² Amin Syukur.Fathimah Usman, *Terapi Hati*, (Jakarta: Erlangga,2012), h. 9

الْجُنُونُ بِأَنَّهُ زَوَالَ الْعَقْلِ أَوْ اخْتِلَالُهُ أَوْ ضَعْفُهُ .

Artinya : “Gila adalah hilangnya akal, rusak, lemah”.⁷³

Definisi tersebut merupakan definisi umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al-’ithu*), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir).

- 1) Jenis jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berfikir maupun sebagainya.
 - a) Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berfikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Di kalangan fuqaha Gila semacam ini di sebut dengan *Al-junun Al-muthbaq*.
 - b) Gila berselang Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus menerus. Apabila keadaan tersebut menimpanya maka ia kehilangan fikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berfikir kembali seperti biasa.
 - c) Gila sebagian gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara lain ia masih tetap dapat berfikir.
 - d) Dungu (*Al-’ithu*) Para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi orang dungu (*ma’atuh*) sebagai berikut

⁷³ Ahmad Wardi Muslich *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 127

.“Orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit”⁷⁴. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkat Gila yang paling rendah. Dengan demikian, dungu berbeda berfikir bukan menghilangkannya, sedangkan Gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berfikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berfikirnya tidak sama dengan orang biasa (normal).⁷⁵

Zakia Daradjat dalam buku Islam dan kesehatan memaparkan Gangguan kesehatan mental dapat mempengaruhi:

- a) Perasaan; misalnya cemas, takut, iri-dengki, sedih tak beralasan, marah oleh hal-hal remeh, bimbang, merasa diri rendah, sombong, tertekan, (prustasi), pesimis, putus asa, apatis dan sebagainya.
- b) Pikiran; kemampuan berfikir kurang, sukar memusatkan perhatian, mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana yang telah dibuat.
- c) Kelakuan; nakal, pendusta, menganiaya diri atau orang lain, menyakiti badan orang atau hatinya dan berbagai kelakuan menyimpang lainnya.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Ibid, H. 127

⁷⁵ Ibid , Ahmad Wardi Muslich. h. 127

d) Kesehatan tubuh; penyakit jamani yang tidak disebabkan oleh gangguan pada jasmani.⁷⁶

Abdul Hamid AL-Balali, dalam buku *Madrasah Pendidikan Jiwa*, “adapun orang-orang yang terguncang oleh guncangan jiwa; terhinakan karna kesombongannya; dan takut karena keanasannya; mereka melepaskan tali kendali jiwa mereka hingga tunduk kepada jiwanya. Padahal ibu mereka melahirkan mereka dengan bebas, merdeka, tanpa kendali apa pun. Jiwa merekalah yang mengendalikan mereka kepada apa yang dikehendaki hawa nafsu. Sehingga mereka gagal dan merugi, baik di dunia maupun di akhirat, jiwa mereka melampaui batas-batas yang telah digariskan Allah swt. dalam kitab-nya dan yang telah dijelaskan Rosulluloh saw dalam sunah-nya. Mereka telah diberi petunjuk tentang sarana-sarana yang diciptakan Allah untuk berhubungan dengan dunia dan membantu mereka untuk beribadah. Namun, mereka mengambil sarana-sarana ini sebagai tuhan tandingan selain Allah ta’ala”.⁷⁷

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an, yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ مَنْ آتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan”. (QS. Al-Furqan [25]: 43)⁷⁸

⁷⁶ Zakiah Daradjat, *Islam Dan Kesehatan Mental*, (Jakarta, Gunung Agung, 1971), H.9.

⁷⁷ Abdul Hamid Al-Balali, *Madrasah Pendidikan Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) h. 2

⁷⁸ Lihat kitab suci Al-Qur’an Surat Al-Furqan[25] ayat 43

b. Konsep Penemuan Hukum Islam Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan Hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akherat kelak, dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan, hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk hidup di dunia ini saja tetapi juga di akherat kelak. Abu Ishak al shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni memelihara, (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan Hukum Islam itu disebut *al-maqasid al-syariah*.⁷⁹

Al-maqasid al-syariah secara utuh adalah suatu hal yang diharuskan bagi seseorang yang ingin memahami nas-nas syar'i secara benar. Hukum Islam dalam arti ayari'at adalah penetapan sepenuhnya menjadi otoritas dan hak prerogatif Allah, dan manusia tidak dapat melakukan intervensi untuk menetapkan dan merubahnya. Sedangkan Hukum Islam dalam arti *fiqih* dapat berubah dalam setiap saat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi zaman, dan manusia dapat melakukan intervensi untuk menetapkan dan merubahnya. Hal ini seperti ditegaskan oleh Al-Alwani

⁷⁹Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta:2013), H.64.

bahwa Hukum Islam di pahami sebagai *syari'at* yang mencerminkan keabadian (tidak berubah) dan hukum Islam dalam arti *fiqih* yang bersifat relatif dan berubah seiring dengan percepatan dinamika ruang dan waktu⁸⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maslahah*, *maslahah* secara etimologi adalah berasal dari akar kata tunggal *Al-Mashalih* sama artinya dengan *Al-shalah*, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu *Al-Istishlah* yang berarti mencari kebaikan, Sering pula kata *mashlahat* atau *istishlah* di identikkan dengan *Al-Munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat ppenggunaannya, Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untu meraih kemanfaatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut hal *mashlahat*. Dan istilah ini telah diserap menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian *mashlahat* secara terminologi adalah banyak dikemukakan oleh para pakar metodologi Hukum Islam, antara lain:

Al-Ghazali mendefinisikan bahwa *mashlahat* pada prinsipnya adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan, *Mashlahat* yang dimaksud pada pada definisi ini adalah memelihara maksud-maksud syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya lima perkara tersebut, itulah *mashlahat*, dan menyia-nyiakannya berarti mafsadat serta

⁸⁰*Ibid*, Maimun, Metode Penemuan Hukum, H. 3

menjauhkan segala rintangan untuk terjaminnya pemeliharaan lima perkara tadi, adalah berarti *mashlahat* juga.⁸¹

Dari definisi tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan tetapi secara substansial adalah sama, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat* adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemafsadatan. Kepentingan-kepentingan manusia itu ada yang bersifat primer dan ada juga yang bersifat skunder dan ada yang bersifat komplementer. Adapun *mashlahat* secara kategoris dapat dibedakan pada tiga macam sebagai berikut:

Pertama, *mashlahat mu'tabarah*, yaitu setiap *mashlahat* yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash, ijma, atau qiyas, atau qiyas karena ada 'illat hukumnya yang diakui.

Kedua, *mashlahat mulghat* yaitu setiap *mashlahat* yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi *mashlahat* itu di abaikan/ dibatalkan oleh syari'at karena di dalam peristiwa itu terdapat mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya.

Ketiga, *mashlahat mursalah* yaitu kemashlahatan-kemashlahatan yang timbul setelah Nabi S.A.W. wafat, atau kemashlahatan yang muncul dalam benak pikiran manusia sepeninggal nabi, dan *mashlahat* tersebut diakui dan tidak berlawanan dengan syari'at (Jalaludin Abdurahman, 1983:

⁸¹*Ibid*, h. 54

18). Dengan kata lain, *mashlahat mursalah* adalah ungkapan penetapan sesuatu hukum berdasarkan *mashlahat* atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari'at di terima atau ditolaknya. Berdasarkan ungkapan tersebut yang dimaksud *mashlahat mursalah* adalah di sini adalah menetapkan hukum pada suatu masalah berdasarkan prinsip meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dengan tidak menyalahi maksud-maksud syari'at, walaupun tidak terdapat nash yang tegas dari syari'at, tetapi hal itu bila dilakukan benar-benar mendatangkan kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, sekurang-kurangnya dapat menghasilkan manfaat atau menghilangkan mudarat.⁸²

Mashlahah mursalah atau *Al-Mashlahah Al-Mursalah* dalam bentuk atau sebagai *sifat-mausuf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas keterangan yang menunjukkan boleh atau tidakbolehnya dilakukan.⁸³ Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan istilah atau *mashlahah mursalah* sejajar dengan *istishan* di antara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki qiyas. Sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah prinsip-prinsip dimana para intelektual Islam lebih menyadarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaan nya ketimbang pada hadist. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur atau hakikat *mashlahah mursalah* terdiri dari:

⁸²*Ibid*, h.59

⁸³Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih II*, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h.332

1. Kemashlahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudorotan) bagi manusia.
 2. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (*Maqassid Al-Syariah*).
 3. Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intense legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit daei legislator untuk menolak menerimanya.⁸⁴
- c. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ferspektif Hukum Islam

Upaya Rehabilitatif adalah upaya memperbaiki atau mengembalikan suatu kondisi dari keadaan sakit menjadi lebih sehat, upaya rehabilitatif harus senantiasa di upayakan agar tidak jatuh kepada kondisi yang lebih parah atau buruk.⁸⁵ Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١٠٠﴾

⁸⁴Mohammad Rusfi, Validitas Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Al'adalah* Vol. XII, No. 1 (1 juni 2014), h.78

⁸⁵ Ahsin W AL-Hafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), H.30

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar-Rad [13]: 11)⁸⁶

Para ulama telah sepakat bahwa mempelajari ilmu kedokteran hukumnya *fardu kifayah*, kecuali apabila tidak ada orang lain maka hukumnya menjadi *fardu'ain*. Apabila mempelajari ilmu tersebut diwajibkan, sedangkan tujuannya adalah untuk pengobatan artinya pengobatan merupakan *fardhu kifayah* bagi dokter, apabila terdapat beberapa dokter dalam satu negeri dan menjadi *fardhu'ain* kalau hanya terdapat satu dokter. Dalam hal ini dokter tersebut tidak bisa mengelak dari tugasnya mengobati orang sakit yang datang kepadanya untuk berobat. Oleh karena pengobatan dokter itu merupakan suatu kewajiban sebagai kosekuensi logisnya adalah seorang dokter tidak dapat dituntut karna pekerjaannya dalam bidang pengobatan⁸⁷.

Para fuqaha berpendapat bahwa pengobatan bukan hak melainkan kewajiban, karena berdasarkan pendirian tersebut seseorang harus mengabdikan pengetahuannya kepada masyarakat, dan lebih sesuai

⁸⁶ Lihat Kitab Suci Al-Qur'an Surat Ar-Rad [13] Ayat 11.

⁸⁷ *Ibid.* h.108

dengan kehidupan masyarakat yang di tegakkan atas dasar kerjasama dan saling tolong menolong.⁸⁸

Allah berfirman dalam Qur'an, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

*Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus [10]: 57).*⁸⁹

Ilmu fiqih berkenaan dengan amal manusia, yang terbagi kepada dua bagian besar, yaitu yang khusus terkenal dengan ibadat dan umum yang terkenal dengan nama *mua'malat*. Khusus berkenaan ibadat khusus atau ibadat formal ini adalah ditunjukkan kepada pembersihan jiwa manusia. perbuatan manusia yang berkaitan dengan deria, artinya yang dapat ditanggapi dengan pancaindra tetapi secara tidak langsung berkaitan juga dengan jiwa manusia. Sebab, ibadat itu khusus untuk membersihkan dan menyelamatkan jiwa manusia. Dengan kata lain ibadat khusus itu untuk membersihkan jiwa manusia, malah dalam praktek bukan saja jiwa manusia tetapi juga jasmaninya. Kita ambil saja ibadat sembahyang, sebelum sembahyang kita harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil,

⁸⁸ *Ibid.* h. 110

⁸⁹ Lihat kitab suci Al-Qur'an Surat Yunus [10] Ayat 57

sedangkan dalam sembahyang kita tidak boleh bersifat *riya* (Al-maun: 5) dan sembahyang itu bertujuan menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sembahyang untuk memurnikan tingkah laku manusia secara pribadi dan kolektif. begitu juga dengan ibadat-ibadat formal yang lain, zakat untuk membersihkan dari makanan yang berlebihan. Pendeknya dengan mengamalkan ibadat formal itu manusia menjadi lebih bersih dan suci dan telah mendekatkan diri kepada salah satu sifat Allah, yaitu maha suci (*al qudus*), ibadat formal itu bukan hanya dinyatakan dalam rukun Islam yang lima, tetapi juga ibadat ibadat sunnah seperti sembahyang sunnah, puasa sunnah, sedekah, umroh, dan yang terutama sekali adalah membaca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa. Semua ibadah-ibadah ini berfungsi membersihkan jiwa sebab jiwa itu akan kekal walaupun jasmani sudah musnah.⁹⁰

Metode Al-Qur'an dalam psikoterapi, Al-Qur'an diturunkan untuk mengubah fikiran manusia, kecenderungannya, dan tingkahlakunya, memberi petunjuk kepada mereka, mengubah kesesatan dan kebodohnya mereka, mengarahkan kepada mereka apa yang lebih baik dan bagus bagi mereka dan membekali mereka dengan fikiran-fikiran baru tentang tabiat manusia, dan misinya dalam kehidupan. Psikoterapi pada dasarnya dimaksudkan untuk mengubah fikiran-fikiran pasien jiwa tentang diri mereka sendiri, orang lain, kehidupan, dan berbagai persoalan yang mereka tidak mampu menghadapinya dan menjadi penyebab

⁹⁰Hasan Langgulung, *Teori-Teori Kesehatan Mental*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1992), H. 257.

kegelisahannya. Dalam hal ini ahli psikoterapi berusaha meluruskan fikiran-fikiran si pasien dan menjadikannya mempunyai wawasan tentang dirinya sendiri, orang lain, dan problemnya dengan wawasan yang realistis dan benar.⁹¹

d. Tahap-Tahap Upaya Rehabilitasi ODGJ Perspektif Hukum Islam

1. Psikoterapi ruqyah

Psikoterapi adalah pengobatan dan penyembuhan dengan cara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan dan perilaku, psikoterapi juga disebut dengan terapi kejiwaan dan terapi mental, sehingga individu dapat mengatasi gangguan emosionalnya, dengan cara memodifikasi perilaku pikiran dan emosinya sehingga individu tersebut mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya, sedangkan orang yang melakukan psikoterapi adalah psikoterapis yang umumnya dari kalangan dokter, terapi menurut Al-Qur'an yang diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin seperti salah satu terapi dalam mengatasi gangguan kejiwaan menurut Ibnul Qayyim Al Jauziyah, yaitu terapi ruqyah, terapi ruqyah tidak terbatas pada gangguan jin, tetapi juga mencakup terapi fisik dan gangguan jiwa, terapi ruqyah merupakan salah satu metode penyembuhan yang digunakan oleh Rasulullah saw, disamping menggunakan metode ruqyah juga menggunakan metode pembekaman, pemanasan, makanan, minuman, lingkungan dan harum-haruman,

⁹¹ *ibid, AL-Qur'an dan Ilmu Jiwa, h.283*

psikoterapi ruqyah adalah suatu terapi penyembuhan dari penyakit fisik maupun gangguan kejiwaan dengan psikoterapi dan konseling Islam dengan menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan do'a-doa Rosulluloh shalallahu 'alaihi wa salam.⁹²

2. Terapi Spiritual islam

Terapi spiritual Islam adalah suatu pengobatan atau penyembuhan gangguan psikologis yang dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan pada konsep Al-Qur'an dan Assunah, terapi spiritual Islam memandang bahwa keimanan dan kedekatan kepada Allah adalah merupakan kekuatan yang sangat berarti bagi upaya perbaikan pemulihan diri dari gangguan depresi ataupun gangguan-gangguan kejiwaan lainnya, dua sasaran yang dianggap penting dalam terapi spiritual Islam yaitu kalbu dan akal manusia.⁹³

3. Terapi psikoanalisa

Terapi psikoanalisa adalah tehnik pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali seluruh informasi, permasalahan dan menganalisis setiap kata-kata yang diungkapkan oleh klien, tujuan dari terapi psikoanalisa adalah untuk mengubah kesadaran individu, sehingga sumber permasalahan yang ada didalam diri individu yang semula tidak sadar menjadi sadar, serta memperkuat ego individu untuk dapat menghadapi kehidupan yang realita. Didalam terapi psikoanalisis

⁹² Yadi Purwanto, Sigit Dwi Setyawan, Fenomena Terapi Ruqyah dan Perkembangan Kondisi Afeksi Klien, *indigenous* Vol.8, No. 2, November 2006, h.65

⁹³ Taufiq, *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*. (Jakarta:Gema Isnani, 2006),h.7

adanya hubungan dan interpersonal dan kerjasama yang profesional antara terafis dan klien, terafis harus bisa menjaga hubungan ini sehingga klien dapat merasakan kenyamanan, ketenangan dan bisa rileks menceritakan permasalahan serta tujuannya untuk menemukan terafis. Karena fokus utama dalam proses terapi ini adalah menggali seluruh informasi permasalahan dan menganalisis setiap kata-kata yang diungkapkan oleh klien.⁹⁴

4. Terapi aktifitas kelompok

Terapi aktifitas kelompok adalah salah satu terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada sekelompok klien yang mempunyai masalah keperawatan yang sama, terapi aktifitas kelompok sering dipakai sebagai terapi tambahan, terafi aktivitas kelompok dilakukan dengan cara menggambar, membaca puisi , mendengarkan musik, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Terapi bermusik merupakan salah satu yang paling efektif untuk menyembuhkan ODGJ, terapi ini merupakan terapi tambahan dengan tujuan untuk mengembalikan ingatan memories mereka.⁹⁵

B. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat dipergunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari skripsi ini, Penulis menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan hal yang baru, pada tinjauan pustaka ini penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul

⁹⁴Evi Yuliatul Wahidah, Resistensi Dalam Psikoterapi , *AL-Murabbi*, Vol.3, No. 2, Januari 201, h.161

⁹⁵<http://Jatimnet.Com/Terapi-Musik-Paling-Efektif-Untuk-Penyembuhan-Odgj>.

penelitian ini, sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

Adapun dalam tinjauan pustaka ini dalam bentuk karya ilmiah berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Perspektif Hukum Islam (studi di dinas sosial Kota Bandar Lampung)”. Adapun karya lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

Deby Rahmawati⁹⁶, skripsi thesis mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dalam penelitian skripsi yang berjudul rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa (studi kasus pasien *skizofrenia* di Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta), dalam penelitian ini merujuk pada penelitian lapangan dengan studi kasus, tujuan dilakukannya penelitian tersebut untuk mendeskripsikan bagaimana proses rehabilitasi sosial untuk orang dengan gangguan jiwa di rumah sakit grhasia, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara, observasi, wawancara, dan dokumentasi serta informan yang ada dalam penelitian ini ada 6 orang yang berhubungan dengan proses rehabilitasi dan pasien. Hasil penelitian dalam proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh rumah sakit grhasia yaitu seleksi pasien di bangsal, registrasi pasien, penjemputan pasien dari bangsal menuju gedungrehabilitasi, layanan rehabilitasi berupa terapi okupasi dan latihan kerja dan yang terakhir evaluasi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi tempat penelitian ini di dinas sosial Kota Bandar Lampung sedangkan

⁹⁶ Deby Rahmawati, Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa Studi Kasus Pasien *Skizofrenia* Di Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta, skripsi thesis mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta:2019, h.xii

penelitian terdahulu berlokasi di Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta dan penelitian ini terfokus pada peran dinas sosial Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya terfokus pada upaya rehabilitasi di rumah sakit grhasia yogyakarta.

Dwi Tiya Rahmawati⁹⁷, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga dalam penulisan skripsi yang berjudul Terapi Terhadap Klien Eks Psikotik di balai rehabilitasi Bina karya dan laras yogyakarta, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penyandang psikotik yang dapat di sembuhkan, sehingga pengidap psikotik mampu menjalankan kehidupan dengan memfungsikan sosialnya secara wajar di masyarakat, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan metode penanganan yang dilakukan pekerja sosial terhadap eks psikotik untuk meningkatkan kesehatan mental, hasil penelitian ini menunjukkan metode yang digunakan di balai rehabilitasi sosial bina karya dan laras yogyakarta yaitu pertama, psikotrapi merupakan terapi kejiwaan yang dapat diberikan pada klien yang apabila kemampuan menilai realitas kembali pulih dan pemahaman diri sudah membaik dan mendapat terapi biomedis. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajian penelitian ini terfokus pada peran dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa sedangkan penelitian sebelumnya terfokus pada di balai rehabilitasi Bina Karya dan Laras Yogyakarta.

⁹⁷Dwi Tiya Rahmawati, Terapi Terhadap Klien Eks Psikotik Di Balai Rehabilitasi Bina Karya Dan Laras Yogyakarta, Skripsi Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2018, h.xii

Nur Aima, 10400115086,⁹⁸ mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Terhadap Rehabilitasi Mantan Pengguna Narkoba, penelitian ini memiliki dua peranyaan penting, Bagaimana peranan Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi mantan pengguna narkoba di Kabupaten Bulukumba, dan Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi terhadap mantan pengguna narkoba. jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolaan analisis data yang dilakukan dengan melalui 3 tahapan: yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang telah di kemukakan di atas yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang peran dinas sosial dalam upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang peran dinas sosial dalam rehabilitasi pengguna narkoba.

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas, yang mengkaji dan membahas tentang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau gangguan psikotik, pembahasan yang telah disebutkan di atas tidak serta merta menutup kemungkinan untuk di adakannya penelitian baru terkait orang dengan gangguan jiwa.

⁹⁸ Nur Aima, Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Terhadap Rehabilitasi Mantan Pengguna Narkoba, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 2019, h.vii

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah* Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002.
- AL-Hafidz Ahsin W, *fiqih kesehatan*, jakarta: Amzah, 2010
- Al-Balali, Abdul Ahmad, *madrasah pendidikan jiwa*, jakarta: Gema insani, 2003
- Al-Jamal, Hasan Muhammad Ibrahim, *penyembuhan dengan dzikir dan do'a*, jakarta: cendekia, 2003.
- Al-Qussy, *Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Anwar, Rosihon, *Ahlak Tasawuf*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010.
- Daradjat, Zakiah, *Islam dan kesehatan mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1990
- Davison Gerald, Neale John, Kring Ann M, *Psikologi Abnormal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- El muhtaj Majda, *dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, sosial, budaya.*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2009
- Gray D Jerry, *Rosulullah Is My Docter*, Jakarta: Sinergi, 2010.
- Hadayati, Nur, Mawardi, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: Cv. Pustaka Setia Bandung, 2009.
- Happosan Situmorang, Jhohannes. *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Penderita Skizofrenia Yang Mengalami Penelantaran*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011.
- Hasan langgulung, *teori-teori kesehatan mental*, jakarta: pustaka alhusna, 1992
- Idrus, *kiat melawan stress berdasarekan al-qur'an dan al-hadit*, pekalongan: sumber ilmu, 1995.
- Jauhar Ahmad Husain AL-Mursi, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Maimun, *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya*. Anugrah Utama Raharja (Aura) B. Lampung: 2013.

Muhammad, Abdurkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004.

Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013.

Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Najati, utsman, *Al-qur'an dan Ilmu Jiwa*, Terjemahan ahmad Rifa'i, Bandung: pustaka, 1985.

Notowidagdo, rohiman, *pengantar kesejahteraan sosia*, jakarta: AMZAH, 2016.

Rahmadi Agus, *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi*, Jakarta: Wahyu Qolbu, 2019.

Sholihin Bunyana, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang Undangan*, Yogyakarta: Total Media, 2015.

Sofyan Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqih II*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syukur amin, usman fathimah, *terapi hati*, jakarta: erlangga, 2012.

Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013.

Yoseph Iyus. *Keperawatan Jiwa*, Bandung: Rafika Aditama, 2010.

Yusarlis Zeny, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Jurnal

Elga Andina, *Pelindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa*, *Aspirasi* Vol. 4 no. 2, Desember 2013.

Mohammad Rusfi, *Validitas Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, *Al'adalah* Vol. XII, No. 1 (1 juni 2014).

Dwi Tiya Rahmawati, *Terapi Terhadap Klien Eks Psikotik di balai rehabilitasi Bina karya dan laras yogyakarta*, Skripsi program studi bimbingan dan

konseling islam fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga yogyakarta: 2018.

Deby rahmawati, rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa studi kasus pasien *skizofrenia* di rumah sakit grhasia yogyakarta, skripsi thesis fakultas dakwah dan komunikasi mahasiswa UIN sunan, yogyakarta, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.

Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Wawancara atau surat

Evi, Wawancara Dengan Perawat Yayasan Aulia Rahma Lampung, Bandar Lampung 31 Januari 2020.

Farida, Wawancara Dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 30 Desember 2019.

Muzarin, Wawancara Dengan Kepala Rehabsos Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 30 Desember 2019.

Suheri, Wawancara Dengan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung , Bandar Lampung 18 Januari 2020.